

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peran negara terhadap kemiskinan sangat berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari kondisi ekonomi yang dapat merugikan, hal ini seperti pengangguran dan kematian, negara juga menciptakan keadilan sosial sehingga diharapkan untuk menciptakan system yang dapat memastikan hak-hak dasar setiap individu terpenuhi. Layanan dasar negara merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam menyediakan seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur atau pembangunan sosial ekonomi yang layak untuk warga negara. Negara memiliki peran dalam memastikan stabilitas ekonomi penduduknya untuk mencegah resesi yang dapat memperburuk kondisi kemiskinan oleh karena itu pengembangan program bantuan sosial melalui program-program bantuan sosial negara dapat memberikan dukungan finansial kepada masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan (Alba & Kurniawan, 2019).

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tujuan membentuk pemerintahan demokrasi dan melindungi warga negara Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan pendidikan yang baik untuk bangsa. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi bagi warganya (Johan , 2020). Peran negara terhadap kemiskinan mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan sejahtera, oleh karena itu keterlibatan negara sangat penting untuk menjembatani kesenjangan sosial dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara dilindungi.

Kebijakan pemerintah dapat dipahami sebagai suatu bentuk kebijakan publik berupa suatu keputusan pemerintah yang dalam pembuatannya dilakukan secara sistematis dan mempunyai tujuan serta maksud tertentu terkait kepentingan umum (Wini Delvia Riski, 2021). Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam

memajukan daerahnya sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, melalui dengan mengupayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki mencakup aspek pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, pelayanan public dan keberlanjutan lingkungan dalam mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat tidak hanya pada meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah akan tetapi juga bagaimana cara Pemerintah Daerah mampu menghadapi kesenjangan sosial. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah merancang dan membuat program-program yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan taraf hidup dari persoalan-persoalan masalah sosial seperti kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2023 sebesar 9,36 persen, mendapatkan penurunan sebesar 0,21 persen terhadap bulan September 2022. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang dan adanya penurunan 0,46 juta orang pada bulan September 2022. Menurut Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Tangerang Selatan tingkat kemiskinan pada tahun 2023 sebanyak 2,57 persen mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 2,50 persen. Jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 sebanyak 46,31 ribu jiwa sehingga kondisi ini meningkat dari tahun 2022 sebanyak 44,26 ribu jiwa. Penyebab kemiskinan dapat menunjukkan pada kondisi individu, kelompok, atau pada situasi kolektif masyarakat.

Kemiskinan suatu kota dapat dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu tingkat pengangguran, pendidikan yang rendah, ketidaksetaraan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar. Kemiskinan juga dapat diartikan suatu keadaan individu yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga dengan taraf kehidupan, serta tidak dapat memanfaatkan tenaga mental, dan fisiknya dalam masyarakat. Konsep kemiskinan di Indonesia melibatkan berbagai dimensi, termasuk pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kesempatan ekonomi. Pemerintah Indonesia memandang kemiskinan sebagai masalah serius dan telah mengembangkan program-program untuk mengatasi kompleksitasnya. Faktor

seperti kesenjangan regional, kurangnya pekerjaan yang layak, dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya juga dianggap sebagai bagian dari konsep kemiskinan di negara ini. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Pemahaman tentang kemiskinan sering kali mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya, mencerminkan kompleksitas kondisi tersebut dari berbagai sudut pandang. Kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana individu, keluarga, dan masyarakat yang mengalami kekurangan khususnya dalam hal rendahnya kualitas kehidupan sosial-ekonomi sehari-hari. Kemiskinan juga menggambarkan kondisi kurang mampu dan rendahnya pendapatan yang menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan pokok yaitu sandang pangan papan.

Konsep masyarakat miskin mengacu pada kelompok atau lapisan masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi, sosial, dan akses terhadap sumber daya. Faktor-faktor seperti pendapatan rendah, keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan yang terbatas, dan tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi ciri-ciri masyarakat miskin. Penanganan masalah ini sering melibatkan program bantuan, pembangunan ekonomi, dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat miskin di Tangerang Selatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat ekonomi, akses pendidikan, lapangan pekerjaan, dan infrastruktur sosial. Pemerintah setempat biasanya memiliki data dan program penanggulangan kemiskinan untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rendah. Program-program penanggulangan kemiskinan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah setempat atau lembaga kesejahteraan sosial mencakup bantuan sosial, program pelatihan, dan upaya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dinas Sosial berperan membantu Pemerintah Daerah yang dimana adanya pelaksanaan proses dalam upaya peningkatan produktivitas dan juga berperan aktif dalam memberikan arahan dan masukan dalam rangka peningkatan edukasi seperti pengetahuan, keterampilan, pengalaman bagi setiap individu dan kelompok di

masyarakat. Dinas Sosial juga saling bekerja sama dengan instansi-instansi masyarakat seperti kecamatan, kelurahan, dan tokoh masyarakat untuk kepentingan individu dan kelompok masyarakat. Kemampuan pegawai Dinas Sosial dalam pelayanan sosial dan teknis analisis data, menggunakan komputer, presentasi lisan dan tertulis, manajemen dan pengendalian keuangan, serta melakukan penilaian kebutuhan untuk pengembangan potensi masyarakat dilapangan. Peran tersebut dapat dilakukan Dinas Sosial untuk memperoleh informasi data melalui data primer dan sekunder. Oleh karena itu, pelayanan sosial memegang peranan yang sangat penting dalam mengedukasi masyarakat dan mengembangkan potensi-potensi di dalam kemasyarakatan.

Inklusi sosial merupakan suatu konsep yang menekankan pada upaya untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka, dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat. Ini mencakup akses yang adil dan setara terhadap sumber daya, layanan, dan peluang. Inklusi sosial bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, dan eksklusi sosial dengan mempromosikan integrasi dan partisipasi aktif semua anggota masyarakat. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, inklusi sosial menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini berupa tunjangan kesehatan, tunjangan tidak mampu, dan program jaminan sosial kematian.

Program jaminan sosial kematian menjadi salah satu alat negara dalam mencapai inklusi sosial dengan memberikan perlindungan dan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan. Kewajiban negara yaitu dapat membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan masyarakat.

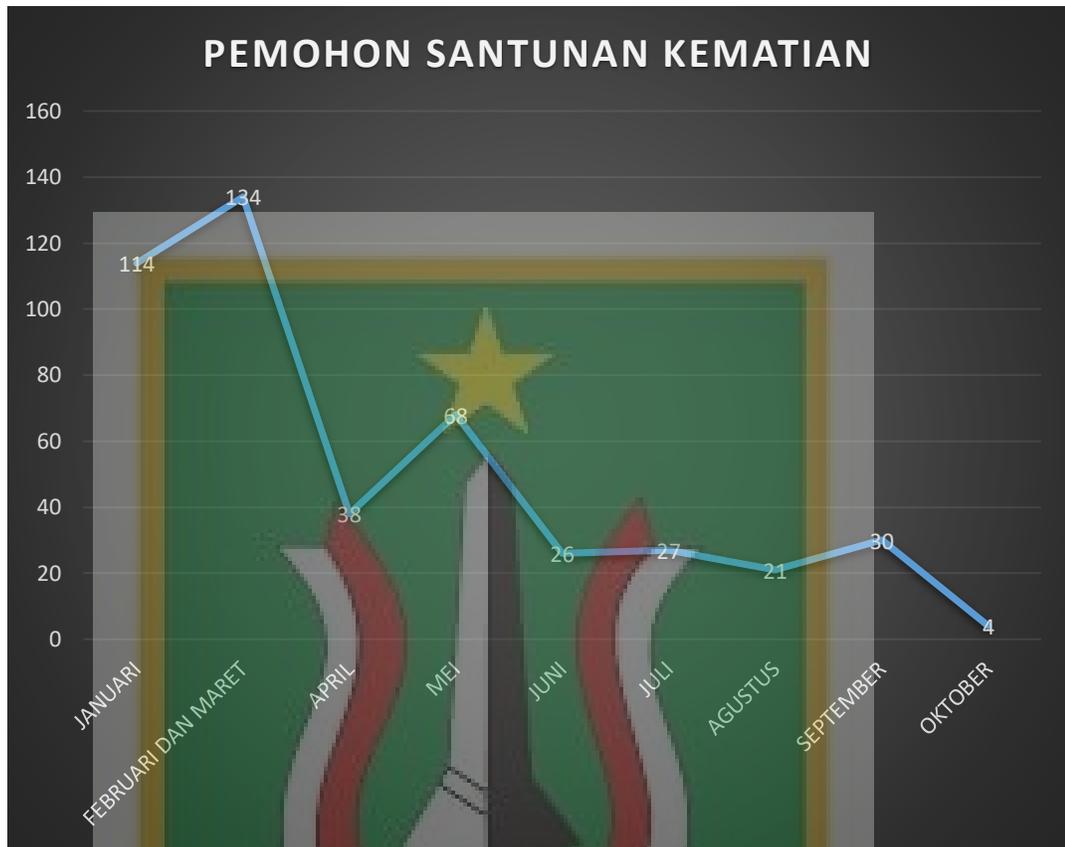
Dalam penanggulangan kemiskinan melibatkan upaya peningkatan kondisi hidup masyarakat melalui kebijakan, program-program, dan pembangunan. Salah satu program dari pemerintah bantuan sosial adalah santunan kematian untuk kalangan

masyarakat miskin secara finansial, oleh karena itu santunan kematian merupakan suatu pemberian bantuan duka oleh Pemerintah daerah kepada ahli waris yang kurang mampu untuk mengurangi beban dalam mengurus pemakaman. Beberapa masyarakat miskin kesulitan ekonomi dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan proses pemakaman anggota keluarganya dan adanya terkendala yaitu keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu dapat menjadi masalah sosial bagi Pemerintah untuk berinisiatif dan berupaya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin di daerahnya dengan mengalokasikan bantuan tersebut itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun peraturan yang membawahi Program Santunan Kematian meliputi Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin atau Kurang Mampu. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota nomor 23 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin atau Kurang Mampu. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin atau Kurang Mampu. (Dinas Sosial Tangerang Selatan, n.d.)

Bantuan sosial juga diatur dalam peraturan secara operasional dapat diartikan sebagai pemberian bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang bersifat tidak berkelanjutan dan ada persyaratan tertentu untuk tidak terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial bagi sebagian masyarakat sangat membantu mengurangi beban pengeluaran yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bersifat sementara. Penerimaan bantuan santunan kematian sering terkait dengan konsep masyarakat miskin. Proses penilaian biasanya melibatkan tingkat pendapatan, kondisi sosial, dan kriteria lainnya untuk menentukan kelayakan. Tujuannya adalah membantu keluarga yang kurang mampu mengatasi beban keuangan akibat kehilangan anggota keluarga.

Berikut jumlah data pemohon Santunan Kematian di kota Tangerang Selatan pada tahun 2023



Berdasarkan hal tersebut, jumlah data yang menerima bantuan Santunan Kematian (Sankem) yang diberikan oleh Pemerintah melalui Dinas Sosial kepada masyarakat miskin di daerah Tangerang Selatan pada bulan Januari-Oktober 2023. Dengan menghadirkan program bantuan sosial seperti santunan kematian, pemerintah berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan mendukung, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kalangan bawah maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam tentang negara dan inklusi sosial dalam penanggulangan kemiskinan melalui program jaminan sosial kematian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti yang telah diuraikan diatas, negara dan inklusi sosial dalam penanggulangan kemiskinan melalui program jaminan sosial kematian melihat fenomena sosial penanggulangan kemiskinan, inklusi sosial menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam penanggulangan kemiskinan melibatkan upaya peningkatan kondisi hidup masyarakat melalui kebijakan, program-program, dan pembangunan. Salah satu program dari pemerintah bantuan sosial adalah santunan kematian untuk kalangan masyarakat miskin. Rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Bagaimana peran negara pada proses inklusi sosial dalam penanggulangan kemiskinan melalui program jaminan sosial kematian?
2. Apakah program jaminan sosial kematian berdampak inklusif terhadap masyarakat miskin?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dicapai yaitu

1. Untuk mengetahui peran negara pada proses inklusi sosial penanggulangan kemiskinan melalui program jaminan sosial kematian.
2. Untuk menganalisis program jaminan sosial kematian berdampak inklusif terhadap masyarakat miskin.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca yaitu:

- Manfaat Teoritis

Hasil penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperkuat konsep dan teori dari inklusi sosial dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosiologi serta menjadi bahan masukan bagi

masyarakat terkait ilmu sosial dan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

- **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Penelitian ini dapat menjadikan sumber informasi dan referensi masyarakat mengenai bantuan jaminan sosial kematian yaitu program Santuan Kematian (Sankem).

### 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dilakukan secara deduksi yang berarti penulisan dilakukan dari konteks secara umum ke konteks yang lebih khusus. Untuk melihat penelitian yang akan dilakukan secara teratur, maka dibentuklah sebuah sistematika penulisan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya sebagai berikut:

- **Bagian Awal/Muka/Pembuka.** Secara berurutan terdiri dari:
  1. Cover (Judul, logo universitas, nama penyusun, nama universitas, fakultas, program studi, dan tahun).
  2. Surat Pernyataan Orisinalitas
  3. Lembar Pengesahan Skripsi
  4. Lembar Persetujuan Skripsi
  5. Abstrak
  6. Kata Pengantar
  7. Daftar Isi
- **Bagian Inti/Isi** merupakan bagian utama laporan yang secara berurutan terdiri dari:

#### BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan, penulis memberikan gambaran umum tentang latar belakang peran negara dalam mengatasi kemiskinan melalui program jaminan sosial kematian dengan mengutip dari beberapa

sumber dan survey nasional maupun internasional. Penulis juga menjelaskan salah satu upaya program jaminan sosial kematian berdampak inklusif terhadap masyarakat miskin, Bab I terdiri dari:

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini, peneliti memberikan sumber penelitian terdahulu dan menguraikan berbagai macam konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Dan penulis juga menjabarkan teori yang digunakan untuk menganalisis studi kasus Program Jaminan Sosial Kematian yaitu dengan menggunakan teori inklusi sosial. Teori ini melihat bagaimana program jaminan sosial kematian ini inklusif untuk masyarakat miskin, Bab II terdiri dari:

- 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu
- 2.2 Kerangka Konsep dan Teori
- 2.3 Kerangka Pemikiran

### BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini, menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yakni kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Setelah data terkumpul, kemudian masuk kedalam tahapan analisis dengan melalui tahapan pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Bab III terdiri dari:

- 3.1 Pendekatan Penelitian
- 3.2 Penentuan Informan
- 3.3 Teknik Pengumpulan Data

### 3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran terkait hasil penelitian yang dilapangan terkait tentang 4.1

Gambaran umum Kota Tangerang Selatan,

### 4.1.1. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan

4.2 Pembahasan tentang negara dan inklusi sosial penanggulangan kemiskinan melalui program jaminan sosial kematian yaitu Santunan Kematian (Sankem), proses penyaluran program tersebut dan dampak dari Santunan Kematian untuk msyarakat miskin di daerah kota Tangerang Selatan. Analisis peran Dinas Sosial pada proses inklusi sosial dalam penanggulangan kemiskinan dan analisis program santunan kematian menurut teori inklusi sosial.

## BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan saran dari hasil temuan di lapangan dapat dikatakan bahwa adanya dampak dari program Santunan Kematian (Sankem) untuk masyarakat miskin di daerah Kota Tangerang Selatan untuk menanggulangi kemiskinan.